

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
TAHUN 2025**

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Soft-Copy		
1.	Peta Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, UPTD BLKIP, UPTD Hyperkes dan Keselamatan Kerja	Berisi tentang Peta Struktur Organisasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, UPTD BLKIP, UPTD Hyperkes dan Keselamatan Kerja	Sekretaris	Kepala Dinas	2025	v	v	Selama masih berlaku	https://drive.baliprov.go.id/s/rnKbPmmonzpyYkJ
2.	Upah Minimum Kabupaten/Kota	Berisi Peraturan Gubernur Bali tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024	Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan	Kepala Dinas	2024	v	v	1 Tahun	https://disnakeresdm.baliprov.go.id/umk-mp-umk/
3.	Upah Minimum Provinsi	Berisi tentang Peraturan Gubernur Bali tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024	Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan	Kepala Dinas	2024	v	v	1 Tahun	https://disnakeresdm.baliprov.go.id/umk-mp-umk/



4.	Kegiatan dan Informasi terkait Tugas Pokok Fungsi Dinas	Berisi informasi tentang kegiatan-kegiatan menyangkut tugas pokok dan fungsi seluruh Bidang dan UPTD Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	-	v	Selama masih berlaku	https://disnakeresdm.baliprov.go.id/
5.	Buku Profil Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2023	Berisi informasi bidang Ketengakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral yang memuat data dari bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali serta data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Instansi terkait lainnya Tahun 2024	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	-	v	Selama masih berlaku	https://drive.baliprov.go.id/s/zbzCTELWrpqcDyX



7.	Standar Pelayanan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Memuat Keputusan Kepala tentang Standar Pelayanan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	-	v	Selama masih berlaku	https://drive.baliprov.go.id/s/NqZWfbWSfCAxr4y
----	---	---	------------	--------------	------	---	---	----------------------	---


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ir. Ida Bagus Setiawan, ST., M.Si.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19710420 199803 1 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**DAFTAR USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI BALI**

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1.	Data Informasi tentang Pengaduan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a 	Tidak Terbatas	mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Identitas/biodata pelapor terjamin kerahasiaannya
2.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3.	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
4.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen



5.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
----	---	--	----------------	---	--------------------------------


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ir. Ida Bagus Setiawan, ST., M.Si.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19710420 199803 1 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

